

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Atika, R. N. (2020). Peran Puskesmas dalam Sistem Manajemen Bencana Banjir. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 4(Special 1), 191-202.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM.
- Baldric Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Deby, C. A., Cikusin, Y., & Pindahanto, R. (2019). "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan (Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu)." *Jurnal Respon Publik*, 13(3), 34-41.
- Ekawarna, S. U., Sam, I., & Rahayu, S. (2009). Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 1 (1), 49-66.
- Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(2), 121-134.
- Fintani, Pubita Sasti, and Edi Santosa. (2014). "Studi Evaluasi Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Pematang." *Journal of Politic and Government Studies* 3.2 : 356-365.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

- Hasanah, B. (2019). Akuntabilitas public dalam manajemen bencana tsunami Selat Sunda. *COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 174-188.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26.
- Herdiansyah, Haris, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Istiqomah, U. (2019). Disaster Management (Studi Peran Pemerintah Daerah dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir di Kabupaten Sampang). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kasmad, Rulinawaty. 2018. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Kusumasri, Bevola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Larama, R. (2020). Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Provinsi Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Di Lombok. *Skripsi*. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Mahardika, D. (2020). Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Semarang. *Skripsi*. Departemen Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Mahardika, D., & Setianingsih, E. L. (2018). Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 502-518.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Keuangan Dasar*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nisa, F. (2014). Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir. Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang. *JKMP*, 2(2), 103-220.

- Nurjanah, dkk. 2013. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta
- Pratama, G. (2017). Analisis Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Bengkulu. *Skripsi*. Program Ekstensi Studi Ilmu Administrasi. Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Bengkulu.
- Ramadhan, I., & Matondang, A. (2016). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medandalam Penanggulangan Bencana Alam. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4(2), 176–185.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Rijanta, dkk. *Modal Sosial dalam Manajemen Bencana*. 2014. UGM.
- Ronald Andreas dan Dwi Sarmiyatiningsih, (2010). Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo. Vol. I., No. 1, 31 – 42, yogyakarta
- Sari, A. A., Sabilla, A. A., & Hertati, D. (2020). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik. *Syntax*, 2(5): 21-35.
- Silalahi, Ulber, 2010. *Metode Penelitian Sosial*,. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Penerbit Alfabeta.
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267-278.

Peraturan Perundangan :

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang *Penanggulangan Bencana*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Otonomi Daerah*.

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang *Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.*

Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 16 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Pematang.

Peraturan Bupati Pematang Nomor 73 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pematang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021.

Kajian Penanggulangan Bencana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pematang Tahun 2020.

Data Pemetaan Daerah Rawan Bencana Oleh BPBD Kabupaten Pematang Tahun 2020.

Pematang dalam Angka 2021.

Berita :

IFSW. (2020). Statement on IFSW and COVID-19".
<https://www.ifsw.org/statement-onifsw-and-covid-19/>

Puskapik.com. (2020, 27 Maret). Tok! APBD Pematang Direlokasi Rp 18,3 miliar untuk Tangani Corona. Link
<https://www.puskapik.com/6583/berita/tok-apbd-pematang-direlokasi-rp-183-miliar-untuk-tangani-corona/>

Kompas.com. (2020, 12 Maret). WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global. Link <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>

Pemalangkab.go.id. (2019, 14 November). Profil Kabupaten Pemalang. Diakses pada 10 Oktober 2021. Link <https://www.pemalangkab.go.id/profil-kabupaten-pemalang/>

Infocorona.pemalangkab.go.id. (2021, 14 Oktober). Data Cut off (Kumulatif) Per Kecamatan Kasus Covid-19. Diakses pada 14 Oktober 2021. Link <https://infocorona.pemalangkab.go.id/data/kumulatif>

Kompas.com. (2020, 2 Maret). Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona. Diakses pada 11 Oktober 2021. Link <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona?page=all>

Puskapik.com. (2020, 2 April). Kasus Pertama! Dua Warga di Pemalang Positif Corona. Diakses pada 11 Oktober 2021. Link <https://www.puskapik.com/6959/berita/kasus-pertama-warga-di-pemalang-positif-corona/>